



## LKjIP

### Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019



---

### **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

**LKjIP**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2019**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

## KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas ridhoNYA segala tugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dalam tahun 2019 secara umum berjalan baik.

Sebagai salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dengan ini kami susun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKjIP OPD) Tahun 2019. Materi yang disampaikan meliputi semua kegiatan baik yang dibiayai melalui kegiatan belanja tidak langsung, belanja langsung serta tugas pembantuan yang sumber dananya berasal dari APBD maupun APBN. Kegiatan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2017-2021.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dapat berjalan dengan lancar termasuk dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP tahun 2019 ini masih belum sempurna dikarenakan sistem manajemen informasi data dan laporan masih perlu dikembangkan.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan selanjutnya membantu meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Januari 2019

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Purbalingga



**Drs. SIDIK PURWANTO**

Pembina Utama Muda

NIP.19601114 198503 1 006

NIP.19601114 198503 1 006  
**DAFTAR ISI**

	halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.4 Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis (Renstra) .....	11
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	17
3.2 Realisasi Anggaran .....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas .....	46
4.2 Permasalahan Yang Dihadapi .....	46
4.3 Strategi Pemecahan Masalah .....	47
4.4 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang .....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, adalah setiap akhir tahun anggaran setiap OPD wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang sudah berjalan sejak tahun 1998. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Guna mencapai terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Pengukuran Kinerja.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih baik dan benar, efektif, efisien, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban dalam pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan/ kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

guna terwujudnya akuntabilitas, tranparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/ amanat;
2. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek;
4. Perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Perbaikan berbagai kebijakan yang diperlukan;

### **1.3 Gambaran Umum Organisasi**

#### **a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jalan Mayor Jendral Sungkono No. 24 Kabupaten Purbalingga, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Kepala Dinas               | : 1 orang |
| 2. Sekretariat terdiri dari : |           |
| 1. Sekretaris Dinas           | : 1 orang |
| 2. Subbagian Perencanaan;     | : 1 orang |

- 3. Subbagian Keuangan; : 1 orang
- 4. Subbagian Umum dan Kepegawaian; : 1 orang
- 3. Bidang Perindustrian terdiri dari :
  - 1. Kepala Bidang Perindustrian : 1 orang
  - 2. Seksi Industri Agro : 1 orang
  - 3. Seksi Industri Non Agro : 1 orang
- 4. Bidang Perdagangan terdiri dari :
  - 1. Kepala Bidang Perdagangan : 1 orang
  - 2. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor; : 1 orang
  - 3. Seksi Distribusi Perdagangan; : 1 orang
  - 4. Seksi Pembinaan Pedagang Kali Lima; : 1 orang
- 5. Bidang Pasar terdiri dari :
  - 1. Kepala Bidang Pasar : 1 orang
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; : 1 orang
  - 3. Seksi Manajemen Pengelolaan Pasar; : 1 orang
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional : 6 orang
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) : 5 UPTD



### b. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

1. Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Industri yaitu penetapan rencana pembangunan industri;



2. Sub Urusan Perizinan yaitu :
    - a) penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah;
    - b) penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah;
    - c) penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.
  3. Sub Urusan Sistem Informasi Industri Nasional yaitu penyampaian laporan informasi industri untuk :
    - a) IUI kecil dan izin perluasannya;
    - b) IUI Menengah dan izin perluasannya;
    - c) IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.
  4. Sub Urusan Sarana Distribusi Perdagangan yaitu :
    - a) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
    - b) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
  5. Sub Urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yaitu :
    - a) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
    - b) Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
    - c) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk :
      - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
      - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;
      - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
    - d) Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.  
Namun demikian penerbitan perijinan telah dilimpahkan ke DPMPTSP, antara lain dengan model perijinan One Single Submission (OSS).
  6. Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting :
    - a) menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
-

- b) pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dan barang strategis lainnya di pasar;
  - c) melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
  - d) pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
7. Sub Urusan Pengembangan Ekspor yaitu :
- a) penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dari produk ekspor unggulan yang terdapat dalam 1 (satu) daerah;
  - b) penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Provinsi (lintas Daerah Kabupaten/ Kota);
8. Sub Urusan pembinaan pedagang kaki lima, yaitu :
- a) Melakukan pendataan jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Purbalingga;
  - b) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian jumlah pedagang kaki lima;
  - c) Melaksanakan penataan pedagang kaki lima.
9. Sub Urusan Pengembangan Sarana Prasarana Pasar, yaitu :
- a) Melaksanakan pendataan jumlah pasar milik Pemerintah Daerah;
  - b) Melaksanakan inventarisasi jumlah pasar dengan kondisi baik, dan kurang baik;
  - c) Melaksanakan pembangunan, revitalisasi, rehab dan pemeliharaan pasar milik pemerintah daerah.
10. Sub Urusan Manajemen Pengelolaan Pasar, yaitu :
- a) Mengatur pelaksanaan operasional pasar milik pemerintah daerah;
  - b) Mengelola dan menarik retribusi pasar milik pemerintah daerah;
  - c) Mengelola penarikan pendapatan aset pemda, parkir di dalam pasar.

Selain tugas tersebut di atas Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan;
- e. Pelaksanaan fungsi Kesekretariatan Dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

**c. Kepegawaian**

Jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 seluruhnya sebanyak 108 orang, terdiri dari :

1. PNS	=	69 Orang
2. <u>PTT</u>	=	<u>128 Orang</u>
Jumlah	=	197 Orang

**JUMLAH PNS  
DILIHAT DARI URUTAN PENDIDIKANNYA**

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN										JML
		SD	SMP	SMA/K	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Laki-Laki	5	7	20	-	-	3	-	22	5	-	62
2	Perempuan	-	-	3	-	-	-	-	3	1	-	7
Jumlah		5	7	23	0	0	3	0	25	6	-	69

**JUMLAH PNS  
DILIHAT DARI URUTAN KEPANGKATANNYA**

NO	JENIS KELAMIN	GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV					JML
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1	Laki-Laki	-	-	2	3	3	5	9	2	7	9	1	10	4	1	1	-	-	57
2	Perempuan	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	2	-	-	-	-	-	12
Jumlah		-	-	2	3	3	6	10	3	8	10	6	12	4	1	1	-	-	69

**d. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Untuk asset yang dikelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga saat ini menempati 2 (dua) buah gedung yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono Purbalingga, dimana satu buah gedung yang ditempati Bidang Perdagangan status tanahnya adalah milik Pemerintah Daerah Purbalingga dan satu gedung yang ditempati Sekretariat dan Bidang Industri status tanahnya adalah masih milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk sarana operasional kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga mempunyai kendaraan roda empat sebanyak 10 buah kendaraan, terdiri dari :

- 4 buah kondisi baik
- 4 buah kondisi tidak layak
- 1 buah kondisi sangat tidak layak dan rusak

Sedangkan kendaraan roda dua sebanyak 31 buah, dan roda tiga sebanyak 1 buah selengkapnya daftar aset lengkap yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada daftar asset pada lampiran laporan ini.

#### **1.4 Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga**

Di Bidang Perindustrian, Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kendati demikian, kondisi IKM tetap rawan karena keberpihakan bank yang rendah, pasar bebas yang mulai dibuka, serta terbatasnya kebijakan yang mendukung sektor usaha kecil. Untuk itu pengembangan IKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Program dan kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya IKM, disamping itu mampu memecahkan permasalahan utama yang selama ini sering dihadapi IKM antara lain :

1. Penggunaan teknologi yang rendah
2. Kemampuan pemasaran terutama e-commerce dan pasar global yang terbatas;
3. Belum terjalin dengan baik kemitraan saling menguntungkan antar pelaku usaha (IKM, Usaha Besar dan BUMN);
4. Kelembagaan yang belum tertata dengan baik;

Sedangkan di Bidang Perdagangan permasalahan utama antara lain:

1. Kurang optimalnya ketepatan sasaran distribusi barang bersubsidi (pupuk dan LPG 3kg);
2. Masih terdapat pasar rakyat yang belum optimal kualitas sarana prasarana dan manajemen pengelolaannya;

3. Masih rendahnya kesadaran konsumen untuk menjadi konsumen cerdas;
4. Belum optimalnya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
- 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis (Renstra)
- 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas
- 4.2 Permasalahan Yang Dihadapi
- 4.3 Strategi Pemecahan Masalah
- 4.4 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis (Renstra)

#### A. Visi dan Misi

##### 1. Visi

Visi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021 adalah :

**“PURALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA“.**

##### 2. Misi

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan implementasi dari misi kabupaten yang ke – 5 yaitu :

- Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja ”.

Dengan memperhatikan visi dan misi kabupaten tersebut, tersusunlah visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

**"Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang mandiri berdaya saing, berwawasan lingkungan dan pengembangan potensi daerah".**

Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Industri dan perdagangan yang mandiri dan berdaya saing

Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang mampu memenuhi kebutuhan lokal, regional, nasional dan internasional serta memenuhi standar mutu baik nasional maupun internasional.

2. Berwawasan lingkungan

Industri dan Perdagangan yang dikembangkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

3. Pengembangan potensi daerah

Pengembangan Industri dan Perdagangan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Melihat dari visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan implementasi dari misi Kabupaten Purbalingga yang ke – 5 kemudian dijabarkan menjadi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

1. Meningkatkan peran sektor industri dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan fasilitasi pengembangan industri dan perdagangan berbasis potensi dan sumber daya lokal;
3. Mewujudkan sistem informasi di bidang Industri dan Perdagangan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing;
4. Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan dan sarana prasarana di bidang perindustrian dan perdagangan;
5. Meningkatkan sistem pengawasan perindustrian dan perdagangan serta perlindungan konsumen;

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi Misi dan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 sampai 5 tahun kedepan.



Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya struktur industri dan perdagangan yang tangguh serta keterkaitan hulu hilir yang berkesinambungan;
3. Meningkatkan produktifitas dan kualitas produk Industri dan Perdagangan yang berdaya saing dan berorientasi ekspor;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen dan sarana prasarana perdagangan;
5. Terwujudnya ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan jumlah mencukupi dan harga terjangkau;
6. Terwujudnya iklim usaha yang mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan;
7. Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang industri dan perdagangan.

Atas dasar tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan indeks kepuasan pelayanan masyarakat di bidang Industri dan Perdagangan;
2. Meningkatkan sumber daya industri yaitu sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi, dan pemasaran;
3. Mengembangkan sentra-sentra industri dan meningkatkan produksi serta produktifitas industri;
4. Meningkatkan kualitas, standarisasi dan daya saing produk industri;
5. Meningkatkan sumber daya usaha perdagangan, manajemen dan pemasaran;
6. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pasar rakyat;
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan;
8. Meningkatkan pengawasan distribusi perdagangan, standarisasi dan perlindungan konsumen;
9. Meningkatkan daya saing dan nilai ekspor perdagangan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan, maka perlu adanya perumusan kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur, serta sarana dan prasarana kerja;
2. Meningkatkan fasilitasi peningkatkan sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana dan tehnologi di bidang industri dan perdagangan;
3. Penumbuhan wirausaha baru di bidang industri dan perdagangan;
4. Fasilitasi standarisasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk industri;
5. Fasilitasi peningkatan daya saing dan produk industri;
6. Fasilitasi pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
7. Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat, barang penting, barang strategis, barang bersubsidi serta barang perdagangan lainnya yang peredarannya perlu diawasi;
8. Pembinaan usaha dan kelembagaan perdagangan;
9. Penyediaan data dan informasi di bidang industri dan perdagangan;
10. Mengembangkan kemitraan di bidang industri dan perdagangan.

### **C. Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga**

Dengan kebijakan tersebut dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka program yang dikembangkan dalam rangka pelaksanaan bidang perindustrian dan perdagangan adalah :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah;
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan;
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
4. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana & Prasarana Perdagangan;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri;

## **2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Purbalingga untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2019, sebagai berikut :

**Tabel**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya kualitas IKM	PDRB Sub Sektor Industri	27,11%	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	22.026.318.000
2.		IKM Bersertifikat	90 IKM		
3.		IKM Berorientasi ekspor	75 IKM		
4.		PDRB Sub Sektor Perdagangan	12,53%	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	895.629.000
				Program Standarisasi, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.739.500.000
5.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat Bersih dan Sehat	3 Pasar	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana & Prasarana Perdagangan	8.287.712.000
6.	Meningkatnya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor	Rp. 3.245.448.150.000	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	50.000.000

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

Adapun 3 (tiga) sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas IKM

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas IKM guna mewujudkan tujuan strategis yaitu meningkatnya daya saing industri dan pelayanan perdagangan maka terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai hingga Tahun 2020, yaitu :

- a. PDRB Sub Sektor Industri
- b. IKM Bersertifikat
- c. IKM Berorientasi ekspor
- d. PDRB Sub Sektor Perdagangan

Adapun pencapaian kinerja pada Sasaran 1 dimaksud, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	% Capaian Tahun 2018	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas IKM	PDRB Sub Sektor Industri	4.264.063	4.519.907	4.576.623	107,33	105,13	97,5
	IKM Bersertifikat	64	90	115	127,7	106,6	76,6
	IKM Berorientasi ekspor	60	75	90	120	122	72,8
	PDRB Sub Sektor Perdagangan	12,58	12,53	12,74	101,3	100,9	99%
<b>Rata-rata capaian</b>							<b>Sangat Baik</b>

Nilai PDRB Sub sektor industri tahun 2019 mengalami pertumbuhan secara signifikan dibanding tahun 2018 yakni tumbuh

sebesar Rp. 4.519.907 juta (atas dasar harga konstan) atau naik sebesar Rp. 255.844 juta atau mencapai 107,33% dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 4.264.063 juta.

Perkembangan signifikan sub sector industri ini tidak terlepas dari kontribusi industri pengolahan yang menjadi sector utama di Purbalingga dan telah menjadi ikon industri Purbalingga. Nilai ekonomi dari kategori sector ini berada pada urutan kedua di tahun 2019, sedikit lebih rendah dari ketegori pertanian kehutanan dan perikanan.

Industri pengolahan terdiri dari 15 sub kategori, yakni; 1) industri batubara dan pengilangan minyak; 2) Industri Makanan dan Minuman; 3) Industri Pengolahan Tembakau; 4) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; 5) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus serta Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; 6) Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; 7) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; 8) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; 9) Industri Barang Galian bukan Logam; 10) Industri Logam Dasar; 11) Industri Barang Logam; Komputer Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; 12) Industri Mesin dan Perlengkapan; 13) Industri Alat Angkutan; 14) Industri Furnitur; serta 15) Industri Pengolahan Lainnya.

Di Kabupaten Purbalingga, belum semua sub ketegori industri pengolahan tersebut berjalan. Industri pengolahan yang sudah banyak berkembang di kabupaten Purbalingga meliputi industri – industri makanan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri knalpot, industri rambaut dan bulu mata palsu, serta industri kayu.

Kenaikan PDRB Sub sector industri ini tidak lepas dari kontribusi meningkatnya Jumlah IKM di Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2019, jumlah Industri Kecil, Menengah dan Besar sebanyak 43.358 unit naik sejumlah 118 unit dari tahun 2018 sejumlah 43.239 unit, dengan rincian Industri kecil sebanyak 43.185 unit, industri menengah 115 perusahaan serta industri besar sebanyak 58 perusahaan.

Kondisi demikian, sekaligus juga telah memberikan dampak positif terhadap kenaikan kontribusi sector industri pengolahan terhadap total perekonomian daerah tahun 2019 menjadi 27,24% atau naik sebesar 0,19% dibanding tahun 2018 sebesar 27,05%.

Salah satu tolak ukur daya saing IKM adalah adanya jaminan kualitas produksi, legalitas usaha, serta kompetensi sumber daya manusia pelaku IKM. Sertifikasi yang diikuti oleh IKM yang ada di Purbalingga telah dilakukan antara lain :

1. Sertifikasi jaminan halal
2. Sertifikasi hak merk
3. Sertifikasi GMP (Good Manufacturing Practice)
4. Sertifikasi profesi keahlian batik
5. Sertifikasi profesi keahlian juru las

Dari jumlah IKM pada tahun 2019 sebanyak 43.300 unit, adapun yang telah melakukan sertifikasi sebanyak 115 IKM. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendorong pertumbuhan IKM antara lain :

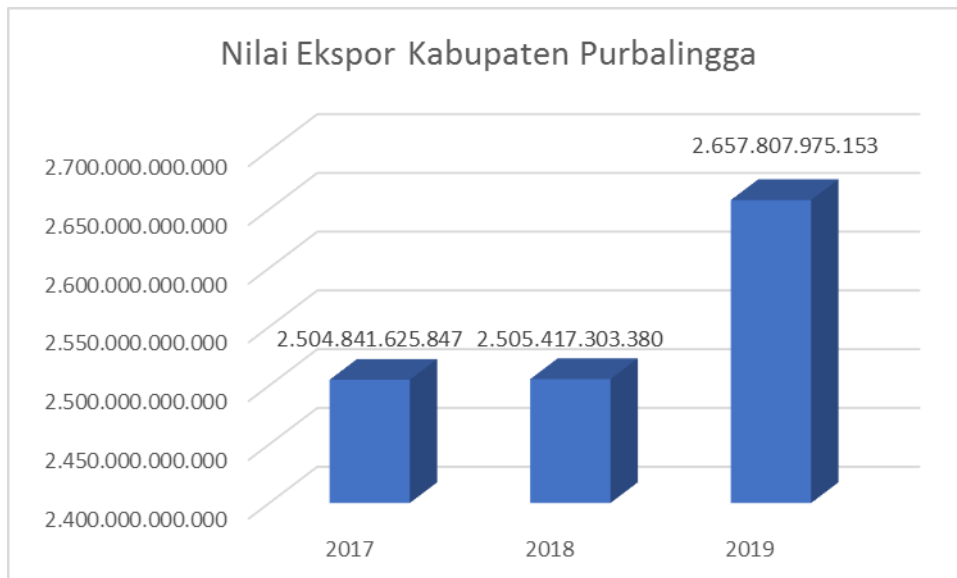
1. Pelatihan peningkatan daya saing bagi pelaku usaha IKM agro dan non agro;
2. Penumbuhan wirausaha baru IKM di sektor industri unggulan dan industri andalan serta industri potensial;
3. Pemberian bantuan sarana prasarana industri bagi IKM agro dan non agro;
4. Fasilitasi legalitas HAKI bagi IKM agro dan non agro;
5. Melakukan pembinaan IKM agar berorientasi ekspor.  
Kegiatan ini dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BPEI) Kementerian Perdagangan RI;
6. Mengikuti pameran dan misi dagang internasional antara lain :
  - a. Pameran INACRAFT di Jakarta
  - b. Pameran APKASI EXPO di Jakarta



- c. Pameran KOFUR ( Korea Furniture ) di Korea Selatan
- d. Pameran Festival Indonesia Moskow di Rusia
- e. Misi Dagang di Jepang

Dampak positif dari upaya di atas dapat dilihat dari peningkatan nilai ekspor Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Nilai ekspor tahun 2017 Rp. 2.504.841.625.847,00
2. Nilai ekspor tahun 2018 Rp. 2.505.417.303.380,00 atau naik Rp. 575.677.533,00
3. Nilai ekspor tahun 2019 Rp. 2.657.807.975.153,27 atau naik Rp. 152.390.671.773,27



Dari sebanyak 43.185 IKM di Kabupaten Purbalingga, terdapat beberapa IKM Potensial ekspor; antara lain IKM Gula Kelapa, IKM Sapu Glagah, IKM Knalpot, IKM Pangan Olahan serta IKM Bulu Mata Palsu.

IKM gula kelapa banyak terdapat di Kecamatan Kutasari, Mrebet, Bojongsari dan Bobotsari. Pangsa pasar ekspor gula kelapa saat ini antara lain ke Negara-negara eropa, amerika, jepang dan cina. IKM Sapu Glagah terdapat di Kecamatan Karangjambu, Karangreja, padamara dan Bojongsari. IKM Knalpot banyak terdapat di Kecamatan Purbalingga

tepatnya di Dukuh Sayangan Purbalingga Lor yang sekaligus sebagai centra IKM Knalpot. Secara perorangan mereka telah lama melakukan pemasaran secara online dengan pangsa pasar luar negeri.

PDRB sub sector perdagangan tahun 2019 tumbuh sebesar 12,74% atau naik 0,16% dibanding tahun 2018 sebesar 12,58%. Komponen PDRB Sub Sektor Perdagangan meliputi kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor telah menjadi sector ekonomi utama di Purbalingga. Nilai ekonomi dari kategori sector ini menduduki urutan ketiga dari 17 sektor kategori ekonomi dibawah kategori pertanian, kehutanan perikanan dan kategori industri pengolahan.

Pada tahun 2019, nilai ekonomi PDRB sub sector perdagangan Kab. Purbalingga sebesar Rp. 2.426.913. juta menurut perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010) atau setara dengan nilai Rp. 3.174,30 miliar atas dasar harga berlaku (ADHB). Nilai ini naik sebesar Rp. 148.172 juta dibanding tahun 2018 sebesar 2.278.741 juta

Perkembangan dari kategori sector ini sejalan dengan perkembangan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga yang mencatatkan bahwa pada tahun 2019 jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) berjumlah 442 atau naik 190 SIUP (57%) dibanding tahun 2018 sebanyak 252 SIUP.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja PDRB sub sektor perdagangan selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 antara lain :

1. Pembinaan dan pengawasan pada distributor-distributor LPG, pupuk, SPBU, distributor KEPOKMAS dan barang penting/strategis lainnya;
2. Pembinaan dan pengawasan distribusi barang KEPOKMAS, barang penting dan strategis lainnya;
3. Pembinaan dan pengawasan toko swalayan;
4. Revitalisasi pasar rakyat.

Sampai dengan tahun 2019 jumlah penyalur LPG 3 kg sebanyak 9 penyalur dengan 1.505 sub penyalur, jumlah SPBU 13 unit, jumlah SPBE 2 unit, distributor pupuk bersubsidi 6 distributor dengan 108 kios pupuk lengkap (KPL). Adapun jumlah distributor barang KEPOKMAS sebanyak 16 distributor.

Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja untuk Sasaran 1 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya kualitas IKM	PDRB Sub Sektor Industri	0,09	TW I	0,09	0,01	100
			TW II	0,09	0,02	100
			TW III	0,09	0,03	100
			TW IV	0,09	0,03	100
	IKM Bersertifikat (%)	30	TW I	30	0	0
			TW II	30	0	0
			TW III	30	51	170
			TW IV	30	51	170
	IKM Berorientasi ekspor	25	TW I	25	0	0
			TW II	25	0	0
			TW III	25	30	120
			TW IV	25	30	120
	PDRB Sub Sektor Perdagangan	0,13	TW I	0,13	0,02	15
			TW II	0,13	0,05	38,5
			TW III	0,13	0,09	69,2
			TW IV	0,13	0,13	100

Upaya pencapaian target kinerja per triwulan dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan baik dengan OPD terkait maupun stakeholders lainnya. Selain itu secara berkala juga dilakukan kegiatan evaluasi triwulanan untuk mendapatkan bahan masukan peningkatan kinerja kegiatan pada triwulan berikutnya.

Pada triwulan pertama, pencapaian target kegiatan masih relative rendah dikarenakan adanya proses persiapan – persiapan administrasi serta koordinasi. Kegiatan mulai berjalan efektif mulai triwulan kedua sampai dengan triwulan keempat.

Namun demikian terdapat target kinerja yang sudah tercapai 100% pada triwulan ketiga, yakni pencapaian IKM Bersertifikat dan IKM berorientasi ekspor.

Secara umum pencapaian target indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 didukung oleh terealisasinya kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian 4 (empat) indikator kinerja di atas, antara lain :

- a. Terlaksananya kegiatan bantuan sarana prasarana bagi kelompok IKM Gula Kelapa;
- b. Terlaksananya kegiatan bantuan sarana prasarana bagi kelompok IKM Kopi;
- c. Terlaksananya kegiatan bantuan sarana prasarana bagi kelompok IKM Sapu;
- d. Terlaksananya kegiatan bantuan sarana prasarana bagi kelompok IKM Batik;
- e. Terlaksananya kegiatan bantuan sarana prasarana bagi kelompok IKM Knalpot;
- f. Terlaksananya kegiatan bantuan sarana prasarana bagi kelompok IKM Antihan Benang;
- g. Terlaksananya kegiatan bantuan sarana prasarana bagi kelompok IKM Kerajian;
- h. Terlaksananya kegiatan sosialisasi Legalitas usaha untuk 30 orang;
- i. Terlaksananya kegiatan sosialisasi HAKI untuk 30 orang;
- j. Terlaksananya kegiatan pelatihan sertifikasi halal bagi 15 orang;
- k. Terlaksananya kegiatan uji komposisi pangan bagi 6 produk;
- l. Terlaksananya kegiatan pendampingan GMP;
- m. Terlaksananya partisipasi dalam “festival Indonesia – Moskow” di Rusia;
- n. Terlaksananya kegiatan Misi Dagang ke Jepang;
- o. Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi IKM Sapu sebanyak 25 orang;
- p. Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi IKM Gula Kelapa sebanyak 25 orang;

- q. Telaksananya kegiatan pelatihan bagi IKM Kopi sebanyak 25 orang;
- r. Terlaksananya Focus group discussion (FGD) bagi IKM Agro sebanyak 30 orang;
- s. Telaksananya kegiatan pelatihan bagi IKM Batik sebanyak 25 orang;
- t. Telaksananya kegiatan pelatihan bagi IKM Wayang Suket sebanyak 12 orang;
- u. Telaksananya kegiatan pelatihan bagi IKM Antihan Benang sebanyak 10 orang;
- v. Terlaksananya Focus group discussion (FGD) bagi IKM Non Agro sebanyak 30 orang;
- w. Terlaksananya kegiatan pengawasan distribusi barang Kepokmas, barang penting dan strategis lainnya selama 12 bulan;
- x. Pelatihan manajemen dan prosedur ekspor bagi IKM potensial ekspor sebanyak 30 IKM;
- y. Penyelenggaraan Pasar Murah di 6 lokasi;
- z. Pembangunan Kawasan Pedagang Kaki Lima sebanyak 2 kawasan;
- aa. Revitalisasi pasar rakyat sebanyak 2 pasar
- bb. Pembinaan manajemen dan pengelolaan pasar rakyat sebanyak 21 pasar
- cc. Pembangunan centra industry logam (lanjutan) sebanyak 21 workshop
- dd. Layanan tera, tera ulang UTTP sebanyak 8.581 UTTP

### **Penggunaan Sumber Daya Keuangan**

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp 2.990.661.783,00 atau 92,37% dari total pagu sebesar Rp.3.237.629.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan keuangan sebesar 7,63% dari pagu yang ada.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan 3 program dan 11 kegiatan, yaitu :

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri;
  - 1) Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Industri Agro;

- 2) Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Industri Non Agro;
  - 3) Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok (DBH-CHT);
  - 4) Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sentra Industri IKM/UPT Logam;
  - 5) Kegiatan Peningkatan Daya Saing Produk industri agro;
  - 6) Kegiatan Peningkatan Daya Saing Produk industri non agro;
  - 7) Kegiatan Peningkatan SDM Industri Agro;
  - 8) Kegiatan Peningkatan SDM Industri Non Agro;
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan;
- 1) Kegiatan Pengawasan Distribusi Barang;
  - 2) Kegiatan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok;



Foto Pelatihan Batik



Foto Pelatihan Tenun



Foto Pelatihan Kerajinan Wayang Suket

## 2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan guna mewujudkan tujuan strategis yaitu Meningkatnya Daya Saing Industri dan Pelayanan Perdagangan tahun 2020, yaitu :

### a. Jumlah Pasar Rakyat Bersih dan Sehat

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 2 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	% Capaian Tahun 2018	% Capaian erhadap Target Akhir Renstra (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat Bersih dan Sehat	11*	3	13	433	550	260
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>433,3</b>	<b>Sangat Baik</b>	

\*) Keterangan : Realisasi tahun 2018 sebanyak 11 pasar merupakan jumlah kumulatif tahun 2017-2018, dimana selama 2017-2018 tersebut diperindag memperoleh alokasi dana DAK dan Tugas Pembantuan dari Kemendag cukup banyak untuk revitalisasi pasar. Adapun target revitalisasi pasar sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2020 per tahun hanya 1 pasar. Sehingga ditahun 2019 kita mendapatkan target target kumulatif revitalisasi pasar sebanyak 3 unit.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-2, dari indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan (rata-rata capaian sasaran ke-2 adalah sebesar 433,3% atau berpredikat sangat baik.

Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja untuk Sasaran 2 adalah sebagai berikut :



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Perentase
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat Bersih dan Sehat	20%	TW I	5%	0%	0%
			TW II	10%	18,1%	181%
			TW III	15%	56,6%	377,3%
			TW IV	20%	86,66%	433,3%

Jumlah pasar yang ada di Purbalingga sebanyak 21 Pasar. dari jumlah tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pasar bersih dan sehat serta pasar yang kurang sehat. Jumlah Pasar Rakyat Bersih dan Sehat pada tahun 2019 sebesar 13 pasar atau 86,66%. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2018 sebesar 2 pasar.

Data Pasar bersih dan sehat tahun 2018, meliputi :

1. Pasar Segamas Kecamatan Kalimanah
2. Pasar Bobotsari Kecamatan Bobotsari
3. Pasar Bukateja Kecamatan Bukateja
4. Pasar Hartono Kecamatan Purbalingga
5. Pasar Cipaku Kecamatan Mrebet
6. Pasar Kaligondang Kecamatan Kaligondang
7. Pasar Kertanegara Kecamatan Kertanegara
8. Pasar Tobong Kecamatan Kutasari
9. Pasar Arjobinangun Kecamatan Purbalingga

Data Pasar yang baru dibangun tahun 2019

1. Pasar Mandiri Kecamatan Purbalingga
2. Pasar Sinduraja Kecamatan Kaligondang

Guna menjaga eksistensi pasar rakyat ditengah pertumbuhan toko swalayan maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan upaya peningkatan daya saing pasar rakyat melalui kegiatan revitalisasi pasar rakyat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Purbalingga juga berupaya meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pasar dan daya saing pengelola pasar melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan pasar, study banding pengelolaan pasar serta mengikuti lomba pasar tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Kedepan, disamping meningkatkan pengawasan dan pembinaan kebersihan pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga akan mengaplikasikan program e-Retribusi guna meningkatkan pelayanan retribusi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor layanan pasar

Adapun jumlah revitalisasi pasar rakyat yang telah dilakukan selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebanyak pasar, meliputi :

Tahun 2018:

1. Pasar rakyat Tobong Kecamatan Kutasari
2. Pasar rakyat Kertanegara Kecamatan Kertanegara
3. Pasar rakyat Cipaku Kecamatan Mrebet
4. Pasar rakyat Kaligondang Kecamatan Kaligondang
5. Kios Anyaman Pasar rakyat Segamas Kecamatan Kalimanah
6. Pasar rakyat Bobotsari Kecamatan Bobotsari

Tahun 2019

1. Pasar rakyat Sinduraja Kecamatan Pengadegan
2. Pasar rakyat Mandiri Kecamatan Purbalingga
3. Pasar rakyat Bukateja Kecamatan Bukateja

Selain melalui revitalisasi pasar, dalam rangka mewujudkan pasar sehat dan bersih, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga telah meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan intensitas pengambilan sampah di TPS Pasar. Selain itu, juga menambah container sampah serta meningkatkan intensitas pembinaan terhadap para petugas kebersihan pasar agar lebih disiplin dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya. Para Pedagang juga didorong secara swadaya dan kesadaran sendiri memiliki budaya “resik-resik dewek” dilingkungan kios, los dan lapak masing-masing

Guna mewujudkan pasar sehat, bekerjasama dengan BPOM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, secara berkala juga melakukan

pengawasan peredaran makanan/ minuman yang mengandung bahan berbahaya.

Secara umum capaian indikator pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan” telah tercapai melebihi target. Untuk indikator kinerja “Jumlah Pasar Rakyat Bersih dan Sehat” telah tercapai 86,66%. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu 20%. Sehingga, bila dihitung tingkat Capaian Kinerjanya terhadap target RKPD Tahun 2019, yaitu sebesar 433,3%.

Bila dibandingkan rata-rata tingkat capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, rata-rata capaian kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018 mengalami penurunan. Pada Tahun 2019 rata-rata tingkat capaian kinerja indikator tersebut sebesar 433,3% sedangkan Tahun 2018 tercapai 550%.

Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dan perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, maka indikator “Jumlah Pasar Rakyat Bersih dan Sehat” tercapai sebesar 13 pasar dari target 3 pasar, sehingga tingkat capaian indikator ini telah tercapai sebesar 433,3%. Tingkat capaian indikator ini menurun dibandingkan capaian Tahun 2018, yaitu 550%.

Penyebab tercapainya target indikator kinerja pada Tahun 2019 ini dikarenakan terealisasinya kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja di atas, antara lain :

- a. Terlaksananya kegiatan Pembangunan Pasar Mandiri tahap 1;
- b. Terlaksananya kegiatan penataan Pasar Bukateja;
- c. Mengadakan kegiatan lomba busana di Pasar Segamas untuk meningkatkan kunjungan ke Pasar Segamas;
- d. Mengadakan kerjasama dengan Perbankan untuk bisa menempatkan ATM di pasar pasar hasil revitalisasi pasar.

Dalam rangka meningkatkan layanan pasar berupa informasi perkembangan harga pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mengimplemtasikan Program Sistem Informasi Harga Pasar melalui SIM HP dengan penempatan Running Teks di Pasar Segamas, Bobotsari dan Bukateja serta di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Melalui sistem ini, perkembangan harga pasar sejumlah barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya akan terus termonitor oleh petugas yang telah ditetapkan di masing-masing pasar.

Para petugas selanjutnya melakukan imputing data perkembangan harga melalui aplikasi yang disediakan setiap hari paling lambat jam 10.00 WIB. Data hasil monitoring selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat di layar monitor yang telah dipasang serta dapat diakses oleh Pejabat melalui aplikasi SIM HP di HP Android.

Mewujudkan pasar sehat diperlukan upaya yang tersinergi dan terintegrasi dari berbagai stakeholders terkait untuk mewujudkan kondisi pasar yang bersih, nyaman, aman dan sehat sehingga seluruh aktivitas didalam pasar rakyat dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Situasi pasar rakyat tersebut akan sangat dipengaruhi oleh pihak – pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar rakyat antara lain keberadaan produsen hulu ( penyedia bahan segar), pemasok, penjual, konsumen, aparatur pengelola dan petugas pasar, pedagang serta masyarakat dan tokoh masyarakat sekitar pasar.

Kendala di dalam mewujudkan pasar sehat antara lain Pertama; masih perlunya peningkatan koordinasi, partisipasi dan sinkronisasi program baik antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan Organisasi swasta, BUMD/BUMN serta organisasi sosial masyarakat lainnya. Kedua; menyangkut budaya bersih dan sehat para pedagang dan pengunjung pasar. Selama ini para pedagang menganggap bahwa kebersihan hanya menjadi tugas para petugas kebersihan karena mereka sudah membayar retribusi kebersihan. Di sisi lain jumlah petugas kebersihan di setiap pasar rakyat masih belum representatif dibanding

luasan pasar dan jumlah pedagang. Ketiga; perlunya peningkatan partisipasi warga masyarakat sekitar pasar untuk secara bersama-sama pedagang pasar turut menciptakan pasar sehat dan bersih. Keempat; menyangkut ketersediaan sarana prasarana kebersihan seperti alat-alat kebersihan, gerobak sampah, bahan-bahan pembersih serta kurangnya intensitas waktu pengambilan sampah di masing-masing TPS pasar.

Masih banyaknya pedagang yang menjual makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya, juga menunjukkan masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan dan pedagang terhadap larangan penjualan makan yang mengandung bahan berbahaya.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp 6.514.524.686,00 atau 96,46% dari total pagu sebesar Rp. 6.753.902.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan keuangan sebesar 3,54% dari pagu yang ada.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan 1 program dan 7 kegiatan, yaitu :

- a. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana & Prasarana Perdagangan;
  - 1) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar;
  - 2) Kegiatan Manajemen dan Pengelolaan Pasar;
  - 3) Kegiatan Pembangunan Kawasan PKL;
  - 4) Kegiatan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - 5) Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan UPTD Pasar Wilayah I;
  - 6) Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan UPTD Pasar Wilayah II;
  - 7) Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan UPTD Pasar Wilayah III;



Foto Pembangunan Kios Pasar Mandiri

### 3. Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Eksport

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai Eksport guna mewujudkan tujuan strategis yaitu Meningkatnya Daya Saing Industri dan Pelayanan Perdagangan tahun 2020, yaitu :

#### a. Nilai Eksport

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 3 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	% Capaian Tahun 2018	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Nilai Eksport	Nilai Eksport	3.029.223.587.134,40	3.245.448.150.000	3.214.915.575.097,35	99,06	94,27	97,11
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>99,06</b>	<b>Baik</b>	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-3, dari indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu hanya mencapai sebesar 99,06% atau berpredikat baik.

Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja untuk Sasaran 3 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Perentase
Meningkatnya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor	1%	TW I	0,25%	0%	0%
			TW II	0,50%	0,20%	40%
			TW III	0,75%	0,72%	96%
			TW IV	1%	0,99%	99,06%

Untuk indikator kinerja “Nilai Ekspor” telah tercapai sebesar 0,99%. Capaian ini kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu target setiap tahun 1%. Sehingga, bila dihitung tingkat Capaian Kinerjanya terhadap target RKPD Tahun 2019, yaitu sebesar 99,06%.

Bila dibandingkan rata-rata tingkat capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3, rata-rata capaian kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2019 rata-rata tingkat capaian kinerja indikator tersebut sebesar 99,06% sedangkan Tahun 2018 tercapai 94,27%.

Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dan perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, maka indikator “Nilai Ekspor” tercapai sebesar Rp. 3.214.915.575.097,35 dari target Rp. 3.245.448.150.000, sehingga tingkat capaian indikator ini telah tercapai sebesar 99,06%. Tingkat capaian indikator ini mengalami kenaikan dibandingkan capaian Tahun 2018, yaitu 94,27%.

Adapun data penyumbang nilai ekspor Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>PERUSAHAAN</b>	<b>KOMODITAS</b>	<b>NILAI EKSPORT (RP)</b>
1	PT. ROYAL KORINDAH	Bulu mata palsu	192.978.881.926,00
2	PT. HYUP SUNG INDONESIA	Bulu mata palsu	46.401.435.321,17
3	PT. INDOKORES SAHABAT	Rambut palsu (Wig) & Perhiasan Imitasi	69.710.809.823,72
4	PT. YURO MUSTIKA	Boneka Manequin dan Wig	14.398.986.062,62
5	PT. SUNG CHANG INDONESIA	Wig (Rambut Palsu)	412.544.000.892,08
6	PT. KESAN BARU SEJAHTERA	Manequen ( Boneka), Rambut Palsu	34.991.328.051,00
7	PT. HASTA PUSAKA SENTOSA	Rambut palsu(Wig) dan Accessories Wig	10.416.585.536,00
8	PT. SUNG SHIM INTERNASIONAL	Bulu mata palsu dan Kuku Palsu	72.659.140.755,63
9	PT HANMI HAIR INTERNATIONAL	Wig Hairpieces & Mannaquin	27.143.809.909,26
10	PT. BOYANG INDUSTRIAL	Wig, dan Accecoris	416.353.152.633,95
11	PT INTERWORK INDONESIA	Bulu mata palsu	20.236.422.211,05
12	PT. MIDAS INDONESIA	Bulu mata Tiruan	33.779.337.205,63
13	PT.MILAN INDONESIA	Wig (rambut Palsu) dan Asesoris	27.745.498.956,67
14	PT.WON JIN INDONESIA	Wig (rambut Palsu)	8.661.859.596,00
15	PT. INTERNASIONAL EYE LASH	Bulu mata palsu	614.456.563.503,57
16	PT. SOPHIAN INDONESIA	Wig (Rambut palsu)	8.204.112.785,58
17	PT. Chunil	Bulu Mata Palsu	1.735.232.963,44
18	PT. Eye Rich	Coconut Mat dan Turunannya	2.588.981.218,00
19	PT. Ye Jin Beauty Ornament	Rambut Palsu	4.003.277.160,00
20	PT.Bouyung Profesional Indonesia	Sapu	904.128.755,00
21	PT. TIGA PUTRA ABADI PERKASA	Bulu mata palsu	35.691.694.091,75



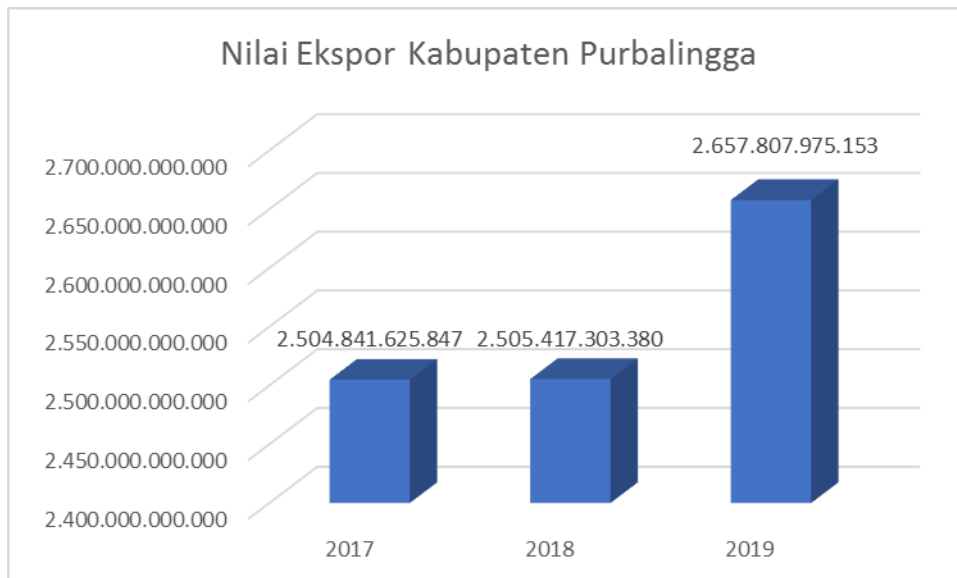
<b>NO</b>	<b>PERUSAHAAN</b>	<b>KOMODITAS</b>	<b>NILAI EKSPORT (RP)</b>
22	PT. SUNSTARINDO WIRAHUSADA	Wig (Rambut palsu) dan Bulu Mata Palsu	8.508.956.386,00
23	PT. SHINHAN CREATINDO	Bulu mata palsu	6.570.500.374,90
24	PT. BINTANG MAS TRIYASA	Bulu mata palsu	45.806.211.803,74
25	PT. SINAR CENDANA ABADI	Bulu mata palsu	63.284.138.081,74
26	PT. MAHKOTA TRIANGJAYA	Bulu mata palsu	47.440.505.276,00
27	PT. ROSA SEJAHTERA EYELASHES	Bulu mata tiruan	16.436.134.789,16
28	PT. BRALING WISNU Satriya	Bulu mata palsu	2.389.732.200,00
29	PT. BIMA NUGRAHA	Wooden Sheet	28.375.537.313,99
30	PT. KARYA BHAKTI MANUNGGAL	Finger joint, Laminating Board	6.853.487.458,70
31	PT. MAJAPURA	Lunch box	70.104.765.621,40
32	CV. PURBAYASA	laminating board	282.206.871.293,71
33	CV. SN JAYA PRIMA	Kamaboko-lta, Wooden Round Stick dan Laminating	22.563.507.301,00
34	CV. PHOENIK AGUNG PRIMA	Industri pengolahan kayu	52.005.214.367,00

Pencapaian peningkatan nilai ekspor Kabupaten Purbalingga tahun 2019 merupakan cerminan dampak positif dari pelaksanaan program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan berupa pelatihan manajemen dan prosedur ekspor yang secara rutin diselenggarakan melalui kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Balai Pengembangan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan RI. Pada Tahun 2019 terselenggara pelatihan tersebut dengan melibatkan peserta sebanyak 30 orang perwakilan perusahaan eksportir atau potensial ekspor

Upaya lain untuk meningkatkan nilai eksport di Kabupaten Purbalingga juga dilakukan melalui fasilitasi perijinan ekspor sesuai ketentuan berlaku, aktif mengikuti kegiatan promosi/pameran/misi dagang baik dalam skala regional, nasional maupun internasional serta turut

mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif di Kabupaten Purbalingga

Kegiatan monitoring perkembangan ekspor di setiap Perusahaan eksportir secara berkala juga terus dilakukan untuk memantau perkembangan nilai ekspor serta mengetahui secara dini kemungkinan adanya kendala/ hambatan yang ditemui eksportir.



Penyebab tercapainya target indikator kinerja pada Tahun 2019 ini dikarenakan terealisasinya kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja di atas, antara lain :

- a. Telaksananya kegiatan pelatihan manajemen dan prosedur ekspor bagi pelaku usaha sebanyak 30 orang;
- b. Terlaksananya kegiatan monitoring/pengawasan ekspor import setiap bulan;

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp 49.853.300,00 atau 99,71% dari total pagu sebesar Rp. 50.000.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan keuangan sebesar 0,29% dari pagu yang ada.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan, yaitu :

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
  - 1) Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Prosedur Ekspor;



Foto 1 Pelatihan Manajemen dan Prosedur Ekspor



Foto 2 Pelatihan Manajemen dan Prosedur Ekspor

### 3.2 Realisasi Anggaran

#### 1. Anggaran APBD Kabupaten Purbalingga

##### a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.540.785.000,00	4.425.497.778,00	97,46
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.171.918.000,00	1.998.434.500,00	92,01
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	259.500.000,00	165.318.255,00	63,71
<b>JUMLAH</b>		<b>6.972.203.000,00</b>	<b>6.589.250.533,00</b>	<b>94,51</b>

##### b. Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>I</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>1.152.150.000,00</b>	<b>994.836.438,00</b>	<b>86,35</b>
1.	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	540.000.000,00	426.482.330,00	78,98
2.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	175.000.000,00	169.330.558,00	96,76
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	201.900.000,00	166.891.150,00	82,66
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	205.250.000,00	203.590.000,00	99,19
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000,00	18.692.500,00	93,46
6.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000,00	9.849.900,00	98,50
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan</b>	<b>895.629.000,00</b>	<b>884.344.664,00</b>	<b>98,74</b>
1.	Pengawasan Distribusi Barang	132.000.000,00	129.912.714,00	98,42
2.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	763.629.000,00	754.431.950,00	98,80
<b>III.</b>	<b>Program Standarisasi, Perlindungan Konsumen dan</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>1.634.841.818,00</b>	<b>93,98</b>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Pengamanan Perdagangan</b>			
1.	Pengelolaan dan Pemeliharaan UPT Metrologi	450.000.000,00	410.462.564,00	91,21
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana &amp; Prasarana Perdagangan</b>	<b>6.753.902.000,00</b>	<b>7.880.769.976,00</b>	<b>95,09</b>
1.	Pembangunan/Revitalisasi Pasar	200.000.000,00	199.590.000,00	99,80
2.	Manajemen dan Pengelolaan Pasar	719.570.000,00	639.402.756,00	88,86
3.	Pembangunan Kawasan PKL	2.500.000.000,00	2.405.825.000,00	96,23
4.	Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	294.450.000,00	285.785.350,00	97,06
5.	Pengelolaan dan Pemeliharaan UPTD Pasar Wilayah I	2.200.000.000,00	2.177.503.900,00	98,98
6.	Pengelolaan dan Pemeliharaan UPTD Pasar Wilayah II	543.600.000,00	534.865.543,00	98,39
7.	Pengelolaan dan Pemeliharaan UPTD Pasar Wilayah III	296.282.000,00	271.552.137,00	91,65
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>49.853.300,00</b>	<b>99,71</b>
1.	Pelatihan Manajemen dan Prosedur Ekspor	50.000.000,00	49.853.300,00	99,71
<b>VI.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Industri</b>	<b>2.342.000.000,00</b>	<b>16.348.700.619,00</b>	<b>74,22</b>
1.	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Industri Agro	520.000.000,00	497.617.000,00	95,70
2.	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Industri Non Agro	390.000.000,00	385.521.500,00	98,85
3.	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok (DBH-CHT)	25.000.000,00	9.479.500,00	37,92
4.	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sentra Industri IKM/UPT Logam	275.000.000,00	267.399.061,00	97,24
5.	Peningkatan Daya Saing Produk industri agro	582.000.000,00	469.456.442,00	80,66
6.	Peningkatan Daya Saing Produk industri non agro	350.000.000,00	303.930.040,00	86,84
7.	Peningkatan SDM Industri Agro	100.000.000,00	82.407.911,00	82,41
8.	Peningkatan SDM Industri Non Agro	100.000.000,00	90.505.665,00	90,51
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.643.681.000,00</b>	<b>10.960.338.771,00</b>	<b>94,13</b>

Dari seluruh belanja langsung yang berasal dari APBD Kabupaten Purbalingga yang digunakan untuk kegiatan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2019 dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.643.681.000,00 terserap sebesar Rp.10.960.338.771,00 atau sebesar 94,13%.

## 2. Anggaran APBN (Dana Alokasi Khusus)

Tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Industri Kecil Menengah sebesar Rp. 14.801.175.000,00, DAK bidang Pasar sebesar Rp. 2.763.310.000,00 dan DAK luncuran tahun 2018 bidang Industri Kecil Menengah sebesar Rp. 4.833.143.000,00.

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>I.</b>	<b>Program Standarisasi, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>1.289.500.000</b>	<b>1.224.379.254</b>	<b>94,95</b>
1.	Metrologi Legal dan Pengawasan (DAK)	1.289.500.000	1.224.379.254	94,95
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana &amp; Prasarana Perdagangan</b>	<b>1.533.810.000</b>	<b>1.366.245.290</b>	<b>89,08</b>
1.	Revitalisasi Pasar (DAK)	1.533.810.000	1.366.245.290	89,08
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Industri</b>	<b>19.684.318.000</b>	<b>14.242.383.500</b>	<b>72,35</b>
	Pembangunan Sentra Industri IKM/UPT Logam (DAK)	14.851.175.000	12.969.577.500	87,33
	Pembangunan Sentra IKM (Luncuran DAK)	4.833.143.000	1.272.806.000	26,33
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.507.628.000</b>	<b>16.833.008.044</b>	<b>74,79</b>

## 3. Pendapatan

Untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang Perindustrian dan Perdagangan, usaha yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan pelayanan sehingga sasaran wajib retribusi akan meningkat kesadarannya untuk membayar. Selain itu upaya ekstensifikasi atau perluasan jenis retribusi untuk meningkatkan PAD bidang

Perindustrian dan Perdagangan perlu adanya suatu perluasan pelayanan baik yang sudah ada maupun yang baru. Namun demikian tentunya harus ada dukungan Peraturan Daerah sebagai sebagai payung hukum sekaligus menjamin kepastian hukum. Sebagai salah satu wujud ekstensifikasi retribusi yang sekarang perlu segera di terbitkan Peraturan Daerah adalah retribusi pelayanan tera dan tera ulang, dimana di tahun 2019 ini sudah bisa memberikan pelayanan kepada wajib tera dan tera ulang.

Sumber pendapatan yang selama ini dikelola oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan adalah **Retribusi Jasa Umum** yang terdiri dari :

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Retribusi Pelayanan Pasar

dan **Retribusi Jasa Usaha** yang terdiri dari :

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Tempat Khusus Parkir

Serta **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Secara keseluruhan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 telah melebihi target yaitu sebesar Rp. 5.246.893.200,00 dari target yang direncanakan Rp. 5.190.000.000,00 atau (101,10%).

Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2019 yang menjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
<b>I.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>5.190.000.000</b>	<b>5.246.893.200</b>	<b>101,10</b>
<b>1.</b>	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</b>	<b>75.000.000</b>	<b>83.175.400</b>	<b>110,90</b>
<b>2.</b>	<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>3.130.000.000</b>	<b>3.330.114.800</b>	<b>106,39</b>
	▪ Pasar Segamas	1.300.000.000	1.394.925.700	107,30

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	▪ Pasar Bobotsari	600.000.000	600.717.000	100,12
	▪ Pasar Bukateja	300.000.000	308.575.600	102,86
	▪ Pasar Kutawis	60.000.000	62.126.100	103,54
	▪ Pasar Panican	55.000.000	59.068.000	107,40
	▪ Pasar Kutasari	150.000.000	165.513.000	110,34
	▪ Pasar Tobong	90.000.000	139.494.900	154,99
	▪ Pasar Padamara	62.000.000	62.140.000	100,23
	▪ Pasar Mandiri	30.000.000	30.054.700	100,18
	▪ Pasar Arjobinangun	20.000.000	20.009.000	100,05
	▪ Pasar Bancar	35.000.000	35.099.500	100,28
	▪ Pasar Kaligondang	41.000.000	60.248.000	146,95
	▪ Pasar Sinduraja	45.000.000	46.820.000	104,04
	▪ Pasar Karanganyar	40.000.000	40.343.500	100,86
	▪ Pasar Kertanegara	30.000.000	30.719.200	102,40
	▪ Pasar Banjarsari	5.000.000	5.450.200	109,00
	▪ Pasar Karangnangka	14.000.000	14.226.000	101,61
	▪ Pasar Cipaku	20.000.000	20.584.000	102,92
	▪ Pasar Hewan Pbg	205.000.000	206.158.400	100,57
	▪ Pasar Hartono	28.000.000	28.040.000	100,14
<b>3.</b>	<b>Retribusi Tera ulang</b>	<b>50.000.000</b>	<b>91.724.000</b>	<b>183,45</b>
<b>II.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>			
<b>1.</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>380.000.000</b>	<b>416.289.000</b>	<b>109,55</b>
	▪ UPT Logam	100.000.000	100.000.000	100,00
	▪ MCK pasar Segamas	140.000.000	142.200.000	101,57
	▪ Penerimaan dari kios STA Kutabawa	50.000.000	91.000.000	182,00
	▪ Sewa kios di luar pasar, MCK,	50.000.000	42.175.000	84,35 %
	▪ Retibusi PKL	40.000.000	41.709.000	104,27
<b>2.</b>	<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>	<b>1.555.000.000</b>	<b>1.325.550.000</b>	<b>85,24</b>
	▪ Parkir Pasar Segamas	1.500.600.000	1.247.950.000	83,16
	▪ Parkir Pasar Bobotsari	15.000.000	15.600.000	104,00
	▪ Parkir Cabut Bulu	8.400.000	8.400.000	100,00
	▪ Parkir Panican ( Khairun )	7.200.000	12.000.000	166,67
	▪ Parkir Hartono	24.000.000	24.000.000	100,00
	▪ Parkir Hewan	16.200.000	11.000.000	67,90
	▪ Parkir Pasar Tobong	3.600.000	3.600.000	100,00
	▪ Parkir Bukateja	11.160.000	3.000.000	26,88
<b>III.</b>	<b>Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah</b>		<b>40.000</b>	
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>	-	<b>40.000</b>	
	▪ Pendapatan Denda Pelayanan Pasar	-	5.000	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019



NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	▪ Pendapatan Denda Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	-	35.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.190.000.000,00</b>	<b>5.246.893.200,00</b>	<b>101,10</b>

Pencapaian target PAD tahun 2019 disamping adanya kerja keras dari para petugas penarik retribusi juga menunjukkan adanya dampak positif dari revitalisasi pasar yang telah dilakukan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa pasar – pasar yang telah dilakukan revitalisasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target PAD baik dari retribusi pelayanan kebersihan maupun retribusi pelayanan pasar

Hal lain yang memberikan kontribusi PAD sangat signifikan adalah pelayanan tera dan tera ulang yang diselenggarakan oleh UPTD Metrologi Legal yang mencapai Rp. 91.724.000,- atau 183,45 % dari target yang ditetapkan sejumlah Rp. 50.000.000,-. Tahun 2019 merupakan tahun pertama penarikan retribusi dari layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sejak pelimpahan kewenangan layanan tera, tera ulang pada tahun 2017 yang semula ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas**

LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2018, disusun mengacu pada Rencana Strategis Dinas tahun 2017 - 2021. Sesuai dengan salah satu tujuannya, maka laporan ini merupakan evaluasi dari tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik.

#### **4.2 Permasalahan Yang Dihadapi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Sentra Industri IKM/UPT Logam (DAK)  
Kegiatan ini adalah merupakan Pembangunan Sentra IKM lanjutan dengan lokasi di Kawasan LIK Logam Kelurahan Purbalingga Lor, namun di tahun 2019 dengan anggaran yang tersedia masih belum dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan Pembangunan Sentra IKM, terutama pembangunan jalan lingkungan dalam sentra.
2. Kegiatan Pembangunan Sentra IKM (Luncuran DAK)  
Kegiatan ini terdiri dari pembangunan fisik dan pengadaan peralatan/mesin sedangkan anggarannya berasal dari sisa dana DAK. Untuk pekerjaan pengadaan peralatan/mesin batal dilaksanakan karena beberapa kali lelang cepat selalu gagal dalam pemilihan penyedia barang/jasa.
3. Kegiatan Revitalisasi Pasar (DAK)  
Kegiatan ini merupakan pembangunan fisik Pasar Rakyat Mandiri, dengan anggaran yang tersedia belum mampu untuk menyelesaikan seluruh Pembangunan Pasar Mandiri, hanya sampai pada pembangunan kios depan, sedang untuk pembangunan los rencana dianggarkan ditahun 2020;
4. Pembangunan Kawasan PKL

Kegiatan ini merupakan pekerjaan fisik untuk Pembangunan Purbalingga Food Centre (PFC) yang diperuntukan untuk PKL di kota Purbalingga. Dengan anggaran yang tersedia juga masih belum dapat menyelesaikan Pembangunan PFC, untuk itu rencana akan dilanjutkan di tahun 2020;

#### **4.3 Strategi Pemecahan Masalah**

1. Untuk kegiatan yang menjadi masalah utama karena kekurangan dana, maka penyelesaian pekerjaan dilanjutkan pada anggaran tahun 2020;
2. Sedang untuk pekerjaan yang berasal dari sisa dana DAK (DAK Luncuan), maka sisa dana wajib dipertanggungjawabkan untuk itu anggaran tersebut akan digunakan lagi pada tahun selanjutnya, untuk pekerjaan yang sama.

#### **4.4 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain :

1. Terkait Pencapaian Sasaran 1
  - a. Memfasilitasi IKM dalam hal sarana dan prasarana yaitu melalui bantuan peralatan produksi sehingga meningkatkan kualitas produk;
  - b. Meningkatkan kualitas SDM IKM melalui pelatihan produksi, pelatihan manajemen perusahaan, magang diperusahaan sejenis;
  - c. Memfasilitasi IKM dalam mempromosikan produknya melalui pameran lokal, regional, nasional maupun internasional;
  - d. Meningkatkan nilai jual produk melalui fasilitasi sertifikasi produk seperti sertifikasi PIRT, halal, paten, dan BPOM;
2. Terkait Pencapaian Sasaran 2
  - a. Meningkatkan SDM pengelola pasar melalui pelatihan manajemen pengelolaan pasar;
  - b. Pelaksanaan pembinaan para pedagang pasar secara berkala;
  - c. Melaksanakan revitalisasi pasar melalui dana APBD, provinsi maupun pusat (TP);

3. Terkait Pencapaian Sasaran 3
  - a. Memfasilitasi IKM yang siap ekspor melalui pelatihan prosedur ekspor bekerja sama dengan Balai Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) Kementerian Perdagangan RI;
  - b. Monitoring ekspor import secara berkala.

